



ASPEK PAJAK PERUSAHAAN FREIGHT FORWARDING DAN LOGISTIK

Prepared By :
Imran Rosyadi

PROFILE PEMATERI



Imran Rosyadi S.Sos. MM

- Bersertifikat Ahli Kepabeanan yang diterbitkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan
- Bersertifikat konsultan pajak – C
- Bersertifikat International Logistics Management yang diterbitkan oleh London Port Academy

Pengalaman terkait industri dan aspek pajak terkait:

- Grup Tax Manager pada Damco Indonesia affiliated Maerk line Group
- Meng-handle berbagai International Freight Forwarder dan Logistik di Indonesia
- Pemateri terkait pada seminar yang diselenggarakan oleh Ortax, dan institusi lainnya
- Pengajar pada Program Vokasi Univ. Indonesia



OVERVIEW MATERI

Overview & Business Model

Regulasi Bisnis & Industri Terkait

Identifikasi Pelaku Bisnis dan Pihak Terkait

Dokumen bisnis dan transaksi didalam Industri

Identifikasi Aspek Pajak

Awal Pendirian

Jasa Freight vs non Unsur Freight

Administrasi Coretax

Reimbursement Issue

Potensial Tax Case Pajak



Definisi Industri



"Freight Forwarding and Logistic Services" means **services of any kind relating to the carriage** (performed by single mode or multimodal transport means), consolidation, storage, handling, packing or distribution of the Goods as well as ancillary and advisory services in connection therewith, including but not limited to customs and fiscal matters, declaring the Goods for official purposes, procuring insurance of the Goods and collecting or procuring payment or documents relating to the Goods.

Freight Forwarding Services also include logistical services with modern information and communication technology in connection with the carriage, handling or storage of the Goods, and de facto total supply chain management. These services can be tailored to meet the flexible application of the services provided. (www.fiata.com)

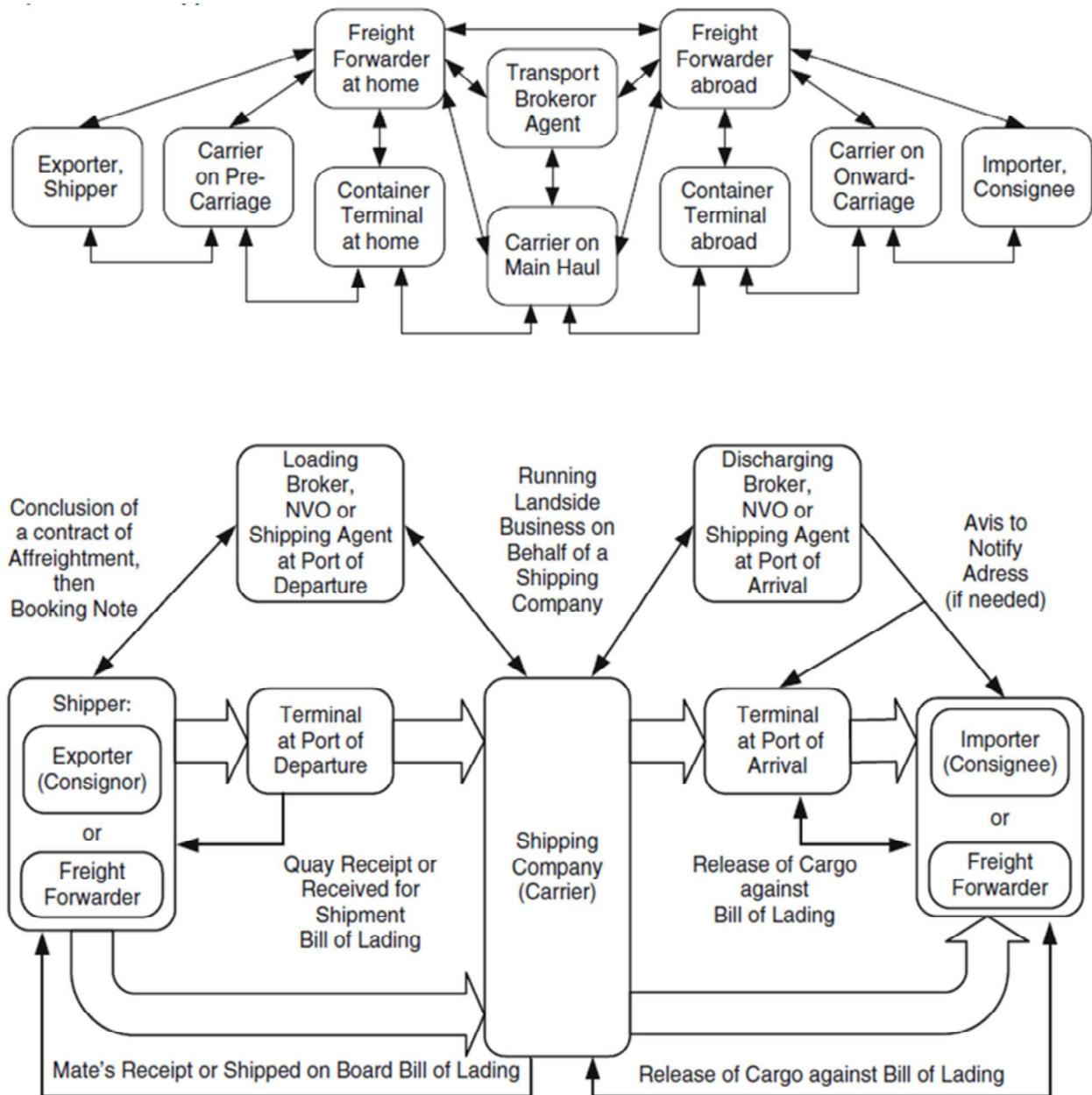
General Business Model



www.ibsolutions.co.id

Overview

Freight Forwarding in Multimodal Transport Chains



Freight Forwarding

Peraturan Menteri Perhubungan RI.No.PM-59 Tahun 2021

Jasa Pengurusan Transportasi (Freight Forwarding) kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut, dan udara yang dapat mencakup kegiatan

- a. penerimaan;
- b. pengelolaan penyimpanan barang yang dilakukan di gudang tertutup maupun gudang terbuka (lapangan penumpukan);
- c. pemisahan atau sortasi;
- d. pengepakan;
- e. penandaan;
- f. pengukuran;
- g. penimbangan;
- h. pengelolaan transportasi;
- i. penerbitan dokumen angkutan barang melalui moda transportasi darat, laut, dan/atau udara;
- j. pengurusan penyelesaian dokumen;
- k. pemesanan ruangan pengangkut;
- l. pengiriman;
- m. pengelolaan pendistribusian;
- n. perhitungan biaya angkutan dan logistik;
- o. klaim;
- p. asuransi atas pengiriman barang;
- q. penyelesaian tagihan dan biaya lainnya yang diperlukan;
- r. penyediaan sistem informasi dan komunikasi;
- s. penyediaan layanan logistik di pasar nasional dan internasional secara konvensional dan/atau elektronik;
- t. penyediaan e-commerce, teknologi internet yang menggunakan sistem satelit yang memungkinkan pelacakan real-time barang;
- u. pengangkut kontraktual atau Non Vessel Operator Common Carrier (NVOCC); dan
- v. pengiriman dan/atau penerimaan barang khusus bawaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait Perpajakan

- 10 -

D. SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
Nomor:.....

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER...../PU/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama		40
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)		36
3. Nomor Induk Berusaha (NIB)		42
4. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama : (Kode) - (Uraian KLU).....		73
5. Alamat		40
6. Tanggal Mulai Terdaftar		100
7. Kewajiban Pajak		110

PPH Sendiri: [] PPh Pasal 25 [] PPh Pasal 25 OPPT [] PPh Pasal 29 [] PPh Final PPN [] Pemungutan PPN [] PPN Kegiatan Membangun Sendiri (KMS)	Pemotongan dan Pemungutan PPh: [] PPh Pasal 4 ayat (2) [] PPh Pasal 15 [] PPh Pasal 19 [] PPh Pasal 21 [] PPh Pasal 22 [] PPh Pasal 23 [] PPh Pasal 26
--	---

Telah terdaftar pada administrasi kami terhitung sejak..... 12,

n.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi
Pelayanan/Kepala KP2BR 110,
NIP.

- 1.Administrasi Awal (perhatikan KLU, dan Jenis Perpajakan terkait)
- 2.Operasional Bisnis - Administrasi Perpajakan (Bulanan dan Tahunan)
- 3.Pengelolaan Manajemen Perpajakan
- 4.Ketentuan Perpajakan



1. Identifikasi Awal Administrasi Pajak

a. Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak (PER 12/PJ/2022)

5229		JASA PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA
	52291	JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (JPT) Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, melalui angkutan kereta api, angkutan darat, angkutan laut
	52292	JASA EKSPEDISI MUATAN KERETA API DAN EKSPEDISI ANGKUTAN DARAT (EMKA & EAD) Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, baik yang diangkut melalui kereta api maupun alat angkutan darat.
	52293	JASA EKSPEDISI MUATAN KAPAL (EMKL) Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, yang diangkut melalui angkutan laut.
	52294	JASA EKSPEDISI MUATAN PESAWAT UDARA (EMPU) Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, yang diangkut melalui alat angkutan udara.
	52299	JASA PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA YTDL Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan pengepakan barang dalam volume besar lainnya, selain yang tercakup dalam kelompok 52291 s.d. 52294. Jasa pengepakan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan pengangkutan dimasukkan dalam Jasa Pengepakan (82920).

52			PERGUDANGAN DAN JASA PENUNJANG ANGKUTAN
	521		PERGUDANGAN
		5210	PERGUDANGAN
		52101	PERGUDANGAN Kelompok ini mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.
		52102	JASA COLD STORAGE Kelompok ini mencakup usaha jasa penyimpanan barang yang memerlukan pendinginan dalam jangka waktu pengawetan tertentu atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir.
		52103	JASA BOUNDED WAREHOUSING ATAU WILAYAH KAWASAN BERIKAT Kelompok ini mencakup usaha/jasa atau yang merupakan bagian dari wilayah pabean yang dengan peraturan pemerintah diberikan perlakuan khusus seperti berada di luar wilayah pabean dan dikelola oleh suatu badan berbentuk perusahaan yang melakukan kegiatan pergudangan, seperti Daerah Industri Pulau Batam.
		52109	JASA PERGUDANGAN LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha jasa pergudangan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 52101 s.d. 52103.

53200	KURIR
	Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan menyelenggarakan kirim mengirim barang cetakan, surat kabar, bungkus kecil, paket, dan uang yang dilakukan oleh swasta, seperti TIKI (Titipan Kilat), DHL. Tidak termasuk pengiriman surat, warkat pos dan kartu pos yang berperangko. Kegiatannya mencakup pengambilan, penyortiran, pengangkutan dan pengiriman (domestik atau internasional) surat pos dan bingkisan (berbentuk surat) dan bungkus oleh perusahaan yang tidak beroperasi di bawah pelayanan umum. Satu atau lebih moda transportasi mungkin dilibatkan dan aktivitas pengiriman mungkin dilakukan dengan angkutan pribadi atau angkutan umum. Termasuk pendistribusian dan pengiriman surat dan bingkisan (parsel).



3. Pengelolaan Manajemen Perpajakan

1. Jenis Jasa Freight Forwarding yang diberikan
2. Keterkaitan Jenis Income PPh Final vs Normal, Reimbursement
3. Keterkaitan Penghasilan dengan biaya Perusahaan (pasal 27, PP 94 tahun 2010)
4. Keterkaitan Jenis Penghasilan dengan perlakuan PPN (PMK 186/PMK.03/2022)
5. Monitor Perubahan Bisnis dan Update Peraturan Perpajakan, Coretax
6. Update PPN terkini PMK No. 71/PMK.03/2022
7. Study kasus Sp2DK Perusahaan Freight Forwarding

1. Identifikasikan Produk Jasa yang diberikan Perusahaan dan aspek pajak (PPN) – akan beragam

B	C	D	E	F	G
X = Material are used in that particular Sales Org					
Please note that material tax (column C) is the current value and it is applicable on country level.					
Please review and replace "X" with either 0 = Exempt or 1 = Taxable.					
Material code	Material Description	ICB Charge Code	Tax code	Local Activity description	Global Activity Description
100487	CFS OVERTIME RECEIVING CHARGE	OVE (Overtime (CFS Related))	1	warehouse receiving cargo when overtime	warehouse receiving cargo when overtime
100488	CFS STORAGE	STO (Storage) REN (Rent/ Storage) QUA (Quay Rent)	1	Cargo storage in the warehouse exceeding the freetime	Cargo storage in the warehouse exceeding the freetime.
100493	CRATING	#N/A	1	charge for crating of goods at CFS/WHS	charge for crating of goods at CFS/WHS
100497	CUSTOMS DUTY	DTY (duty)	0	refer to Bea Masuk+PNBP charge	Duty applied to cargo

Koordinasi dengan bagian Operasion, accounting, dan divisi terkait



Ini merupakan sebagian materi dari training FF &
Logistik yang akan diadakan pada **31 Juli 2025**

IBSolutions
Trusted Tax Partner

 @ib_solutions

 persek-integral-business-solutions

 info@ibsolutions.co.id

 www.ibsolutions.co.id